

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014)

***THE INFLUENCE OF EXECUTIVE CHARACTER AND CORPORATE GOVERNANCE
TO TAX AVOIDANCE IN INDONESIA***

(Study on Manufacturing Company listed on the Stock Exchange in 2012-2014 period)

Sani Hardiyanti Ashari

(**sany_asc@yahoo.com**)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

The purpose of this research is to examine the effect of executive characteristic and corporate governance toward tax avoidance in Indonesia at manufacture companies that listed in Bursa Efek Indonesia (BEI).

Population in this research is manufacture companies that listed in BEI in period of 2012 through 2014. Sample is determined with purposive sampling method, for 45 companies. This research data is obtained from Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and www.idx.co.id. Multiple linear regression method is used as data analyze method in this research.

The result shows that executive characteristic variable have a negative and not significant effect toward tax avoidance in Indonesia. Meanwhile, corporate governance variable has a positive and significant effect toward tax avoidance in Indonesia.

Keywords : *executive characteristic, institutional ownership, the proportion of commissioners, audit committee, quality audit, corporate governance, tax avoidance*

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang sangat penting bagi pembangunan negara. Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang menginginkan pajak yang minimal namun memperoleh profit semaksimal mungkin. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih & Sari, 2013). Maka dalam pemungutan pajak diperlukannya perencanaan strategi untuk meminimalkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat merugikan negara. *Tax avoidance* adalah strategi yang digunakan menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Ada tiga tahapan/langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Mariot Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka Wajib Pajak akan membayar pajak tersebut. Namun, terdapat sisi positif dan sisi negative pada perencanaan penghindaran pajak. Pada sisi positifnya, perusahaan dapat meminimalkan hutang pajak yang bersifat legal namun beresiko memunculkan denda dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Sedangkan pada sisi negatifnya, apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar ketentuan hukum, maka aktivitas tersebut dapat tergolong sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion* pada pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir sehingga bisa diterima sebagai sebuah strategi *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Sistem corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti *Corporate Governance* belum seutuhnya dilakukan baik oleh perusahaan. *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability dan responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Putri, 2006 dalam Saputra, 2012).

Corporate Governance memiliki beberapa proksi yaitu kepemilikan insitusal, struktur dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Dalam beberapa analisisnya, *Corporate Governance* dikelompokkan menjadi dua yaitu *Internal Corporate Governance* dan *Eksternal Corporate Governance*. *Internal Corporate Governance* mengacu pada interaksi dari perusahaan dengan para dewan direksi, manajemen senior dan auditor eksternal. Sedangkan *Eksternal Corporate Governance* berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham.

Selain *Corporate Governance*, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga melakukan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman, 2012). Bagi pemilik perusahaan, pajak yang disetorkan dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

C. LANDASAN TEORI

1. *Agency Theory*

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengu-++++mpulkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Sehingga terdapat hubungan keagenan antara pemerintah (sebagai agen) dengan masyarakat (sebagai principal).

2. Karakter Eksekutif

Dalam menjalankan tugasnya, sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006 dalam Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003 dalam Budiman, 2012), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat. Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006 dalam Budiman, 2012). Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki

ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman, 2012). Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

3. Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*) dan Karakter Eksekutif

Menurut Hartono (2008) resiko ada kaitanya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa resiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula resiko yang ada. Sedangkan menurut Paligorova (2010) mengartikan resiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa resiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula resiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya resiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2010). Coles at al., (2004) dalam Budiman (2012), menyebutkan bahwa resiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003) dalam Budiman (2012) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut.

4. Corporate Governance

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* dalam Effendi (2009), *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Solihin (2009) menyatakan bahwa salah satu implementasi *GCG* di perusahaan adalah penerapan *CSR*. Hal ini karena implementasi *CSR* juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan *GCG*. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum *GCG* Indonesia khususnya

prinsip responsibilitas, dimana dinyatakan bahwa “Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*”. Ada lima komponen utama yang diperlukan untuk memenuhi konsep *good corporate governance*, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), *fairness* (kewajaran)

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berfokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar dan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik akurat dan optimis (Ajinkya, 2005 dalam Annisa, 2011). Struktur kepemilikan dalam perusahaan, dapat mempengaruhi apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, hal ini mempengaruhi dalam struktur pengambilan keputusan keuangan yang terdiri dari investasi, pendanaan dan kebijakan deviden, Haruman (2008). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam hal pengendalian kepada pihak manajemen dengan system memonitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen dalam bagian manajemen laba.

b. Proporsi dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertujuan sebagai pengawasan serta dengan memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab dan memberikan nasihat kepada direksi. Pengangkatan dewan komisaris dilakukan dengan RUPS dengan jumlah satu orang (perseroan), yang dapat menjadi bagian dari dewan komisaris biasanya orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya. Namun dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, Saputra (2012). Dalam dewan komisaris masing-masing anggotanya memiliki kedudukan yang seimbang.

c. Komite audit

Komite ini berfungsi untuk mengawasi perusahaan publik dalam pembuatan laporan serta pengawasan internal perusahaan, hal ini telah diputuskan oleh BEI tentang keharusan dalam pembentukan komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Annisa, 2011). Pohan (2008) dalam Annisa (2011) menyebutkan bahwa dalam pembentukan komite audit terdiri dari

sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Saputra (2012), komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan manajemen serta tindakan tersebut seperti pengawasan dalam penyajian laporan keuangan, pengawasan terhadap peraturan yang telah berlaku dan serta kepatuhan undang-undang.

d. Kualitas audit

Indikasi paling penting dalam *corporate governance* adalah adanya bukti pengungkapan yang akurat dan terpercaya serta transparansi. Annisa (2011) menjelaskan tentang pentingnya transparansi terhadap pemegang saham yang dapat dicapai dengan melakukan pelaporan untuk hal-hal yang terkait perpajakan pada pasar modal serta pertemuan antar para pemegang saham. Selain itu, adanya asumsi yang mengatakan implikasi dari perilaku pajak yang agresif, para pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan dimungkinkan untuk melakukan pencegahan jika diketahui sebelumnya. Kualitas audit juga dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut termasuk ke dalam KAP *The Big Four* atau tidak (Susiana dan Herawaty, 2007 dalam Annisa 2011). Terdapat empat KAP *The Big Four* yang disebut pula sebagai *Big Four Worldwide Accounting Firm*, yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC), Ernst & Young, The Deloitte Touche Thomatsu, serta Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Selain itu disebutkan pula Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar lebih independen dalam pelaporannya karena dapat bertahan dari berbagai tekanan pihak yang berkepentingan didalam perusahaan terhadap adanya pelanggaran (Watts *et al.*, 1986 dalam Kurniasih dan Sari, 2011).

5. Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)

- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia menginginkan pajak yang minimal. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam tatanan peraturan perpajakan (Suandy, 2008)

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang didistribusikan dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih risiko yang lebih rendah. Maccrimon dan Wehrung (1990) menyatakan bahwa eksekutif dengan karakter *risk averse* biasanya sudah berusia lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar.

H1: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

2. Kepemilikan Institusional

Dengan kepemilikan institusional, akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang

berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai bagian dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance* (Dewi, 2013). Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat di peroleh untuk pengujian adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

3. Proporsi Dewan Komisaris

Tugas pengawasan dilaksanakan oleh komisaris independen bersama dengan dewan lainnya dalam menentukan strategi kebijakan yang terkait dengan pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen maka perumusan strategi perusahaan yang dilakukan bersama manajemen perusahaan dan *stakeholder* akan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien termasuk dengan kebijakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* (Hanum, 2013 dalam Dewi, 2013). Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat diperoleh untuk pengujian adalah:

H3: Struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

4. Komite Audit

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik (Andriyani, 2008). Penelitian Dewi (2013) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian membuktikan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam menjalankan fungsinya komite audit melakukan pengendalian dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen agar sesuai dan tidak melanggar peraturan yang telah ada, sehingga tidak ada kecurangan berkaitan dengan pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat diperoleh untuk pengujian adalah:

H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

5. Kualitas Audit

Annisa (2011), mengatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* lebih cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP yang bukan termasuk dalam *The Big Four*, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak dalam penyusunan laporan keuangan. Annisa (2011) menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan memperoleh hasil bahwa keduanya saling berpengaruh secara signifikan. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat diperoleh untuk pengujian adalah:

H5: Kualitas audit berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*

VARIABEL PENELITIAN DAN OPERASIONAL

a. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah suatu strategi penghindaran pajak secara legal dengan mengurangi pajak terutang dengan mencari kelemahan pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Dewi, 2013). *Tax Avoidance* dapat diukur menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Karakter Eksekutif

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Oleh Paligrova (2010) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{RISK} = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T-1)}}$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*.

c. Kepemilikan Institusional

Merupakan kepemilikan saham secara mayoritas yang dimiliki oleh perusahaan terkait, bila suatu perusahaan memiliki lebih dari satu pemegang saham maka kepemilikan dapat diukur dengan penghitungan total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilik perusahaan. Penelitian ini merujuk pada kepemilikan individual pada kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Investor} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

d. Proporsi Dewan Komisaris

Penelitian ini menggunakan $\pm 30\%$ dari total keseluruhan anggota komisaris agar terpenuhinya *corporate governance*. Dengan rumus :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

e. Komite Audit

Pengukuran komite audit didasarkan pada jumlahnya. Merujuk pada penelitian Dewi (2013), komite audit sekurang-kurangnya beranggotakan tiga orang, yang diketuai komisaris independen yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite dalam suatu perusahaan yang digunakan sebagai alat ukur. Komite audit = Jumlah komite audit.

f. Kualitas Audit

Hal ini dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dapat diukur berdasarkan besar kecilnya KAP *the Big Four* atau KAP *non The Big Four* (Sulistiarini dan sudarno, 2012 dalam Dewi 2013). Empat KAP The Big Four yaitu; Price Waterhouse Coopers (PWC), Ernst & Young, The Deloitte Touche Thomatsu dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Kualitas audit diukur dengan variabel dummy, dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* diberikan skor 1, dan untuk *non The Big Four* diberi skor 0

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (annual report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014, yang dapat diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan auditan per- 31 Desember dari tahun 2012-2014 dan masih melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Perusahaan memiliki data lengkap dan relevan yang dibutuhkan dalam variabel penelitian yang telah ditentukan dari tahun 2012-2014.
- c. Perusahaan yang memperoleh laba dari tahun pengamatan (2012-2014). Laba dimaksudkan sebagai dasar dari pengenaan besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan pada perusahaan.
- d. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan, agar kriteria pengukuran sama.

METODE ANALISIS DATA

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistic deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data dan gambaran keseluruhan sampel yang telah dikumpulkan serta memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dilihat dari nilai maksimum-minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dibuat, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Sebelum

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov (KS)* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ dimana: a. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal , b. Jika $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan. Menurut Idris (2006) multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas tersebut, maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan) dari model regresi berganda atau menambah variabel bebasnya.

Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* $< 0,1$ atau $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila *tolerance value* $> 0,1$ atau $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Untuk mendeteksi

heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan model *Durbin-Watson*. Kriteria pengujiannya adalah:

- (a) angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif
- (b) angka DW di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi
- (c) angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *corporate governance* dan karakter eksekutif terhadap *Tax Avoidance* secara simultan. Bila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. PV hasil < PV peneliti ($\alpha < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya bila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. PV hasil > PV peneliti ($\alpha > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

b. Uji t

Pengujian secara parsial menggunakan uji t. Pengujian secara parsial ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. H_a akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α). H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, variabel independen secara individu tak berpengaruh terhadap variabel dependen. PV hasil < PV peneliti ($\alpha < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. PV hasil > PV peneliti ($\alpha > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Uji koefisien determinasi (Adjusted R^2)

Pengaruh ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. Nilai koefisien determinasinya antara nol dan satu, jika nilai mendekati satu maka memiliki arti variabel dapat memberikan informasi dalam memprediksi variabel dependennya.

d. Model Analisis Regresi Berganda

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan bagaimana arah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
α	= Konstan
$\beta_1 \dots \beta_5$	= Koefisien Regresi
X1	= Kepemilikan Institusional
X2	= Proporsi Dewan Komisaris
X3	= Komite Audit
X4	= Kualitas Audit
X5	= Karakter Eksekutif
e	= Error

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Proses pemilihan sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan relevan dari tahun 2012-2014	144
Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba positif tahun pengamatan 2012-2014 dan menggunakan nilai mata uang Rupiah	144
Jumlah data sampel yang dipakai dan akan diolah	144
Data Outlier	(30)
Jumlah data sampel yang diolah	114

Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tax_avoidance	114	.101	.336	.24315	.042415
karakter_eksekutif	114	.005	33.825	1.49889	4.851180
kepemilikan_institusional	114	.251	.982	.72600	.185568
proporsi_dewan_komisaris	114	.000	1.000	.37040	.159740
komite_audit	114	2.000	5.000	3.14912	.465300
kualitas_audit	114	.000	1.000	.64912	.479352
Valid N (listwise)	114				

Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
N	114
Normal Mean	.0000000
Parameter Std. Deviation	.03786461
s ^a	
Most Absolute	.094
Extreme Positive	.044
Differences Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z	.999
Asymp. Sig. (2-tailed)	.271

Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00057
Cases < Test Value	57
Cases >= Test Value	57
Total Cases	114
Number of Runs	55
Z	-.564
Asymp. Sig. (2-tailed)	.572

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
karakter_eksekutif	.982	1.019
kepemilikan_institusional	.947	1.056
proporsi_dewan_komisaris	.933	1.072
komite_audit	.911	1.098
kualitas_audit	.898	1.113

Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.000
karakter_eksekutif	.441
kepemilikan_institusional	.305
proporsi_dewan_komisaris	.620
komite_audit	.179
kualitas_audit	.517

PENGUJIAN HIPOTESIS

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.041	5	.008	5.504	.000 ^a
	Residual	.162	108	.002		
	Total	.203	113			

Uji Nilai t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.235	.030		7.812	.000
karakter_eksekutif	.000	.001	-.021	-.239	.812
kepemilikan_institusional	.060	.020	.265	2.999	.003
proporsi_dewan_komisaris	.028	.024	.105	1.180	.241
komite_audit	-.021	.008	-.230	-2.553	.012
kualitas_audit	.031	.008	.346	3.816	.000

Uji Koefisien Determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square
1	.451 ^a	.203	.166

PEMBAHASAN

1. Pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara karakter eksekutif dengan *tax avoidance*, yang ditunjukkan dengan nilai sig dari karakter eksekutif yang lebih besar dari nilai α . Hal ini sejalan dengan penelitian Dyreng *et al.*, (2010), melakukan pengujian terhadap bagaimana pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak diperusahaan, dengan hasil pimpinan perusahaan sebagai eksekutif secara individu belum secara jelas menerangkan jenis karakter seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif belum dapat mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012); Dewi dan Jati (2014); Maharani dan Suardana (2014); dan Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Pengaruh kepemilikan institusional *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis kepemilikan institusional dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Pohan (2008) dalam Annisa (2011), yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga akan mengurangi kemungkinan dalam penghindaran pajak. Artinya, semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang terjadi

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013), yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, kepemilikan institusional belum dapat mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

3. Pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dalam model penelitian, variabel proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2011) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan. Artinya dengan adanya dewan komisaris independen, belum dapat mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) dalam Annisa (2011) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dalam model penelitian, variabel komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi (2013) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian membuktikan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam menjalankan fungsinya komite audit melakukan pengendalian dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen agar sesuai dan tidak melanggar peraturan yang telah ada, sehingga tidak ada kecurangan berkaitan dengan pajak. Semakin komite audit berfungsi lebih efektif, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2011), yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya, kualitas audit belum dapat mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

5. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dalam model penelitian, variabel kualitas audit berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2013) yang menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan (Chai dan Liu, 2010 dalam Annisa, 2011).

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan dengan Annisa (2011) yang menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan memperoleh hasil bahwa keduanya saling berpegaruh secara signifikan.

SIMPULAN

Hasil pengujian data dalam penelitian mendasari pengambilan simpulan dalam penelitian terkait nilai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia. Hasil pengujian menyatakan bahwa *tax avoidance* di Indonesia yang di proksikan dengan rumus CETR dapat dipengaruhi beberapa faktor, yang di dalam penelitian ini menggunakan faktor karakter eksekutif yang dihitung menggunakan *corporate risk* dengan menghitung standar deviasi EBITDA dan factor *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional yang dihitung menggunakan pembagian antara jumlah pembayaran pajak dan laba sebelum pajak, kemudian proporsi dewan komisaris yang dihitung menggunakan jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris dikalikan 100%, kemudian komite audit yang dihitung menggunakan jumlah komite audit, serta kualitas audit yang dihitung menggunakan dummy. Apabila perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maka diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan diaudit oleh KAP non The Big Four maka diberi nilai 0. .

Hasil pengujian data menjelaskan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance* di Indonesia. Sedangkan variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini hanya berupa data Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

2. Penelitian ini juga menggunakan variabel independen yang terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan kualitas audit.

3. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* hanya mampu dijelaskan oleh variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit sebesar 16,6% yang sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian sebesar 83,4 %.

SARAN

Dari beberapa keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini, saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel lain dengan beberapa proksi yang terkait dengan *tax avoidance* agar mendukung penelitian selanjutnya.
2. Menambahkan jumlah sampel dan juga memperpanjang periode laporan keuangan perusahaan manufaktur menjadi lebih dari tiga tahun.
3. Menambahkan variabel kontrol sebagai alat hitung pada variabel karakter eksekutif.

Daftar Pustaka

- Agusti, Wirna Yola. 2012. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*.
- Ajinkya, B., S. Bhojraj, dan P. Sengupta. 2005. *The Association Between Outside Directors, Institutional Investors And The Properties Of Management Earnings Forecast*. Journal of Accounting Research Vol. 43(3): 343-376.
- Andriyani, Ade, dkk. 2008. *"Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Official Website Perusahaan Studi Kasus PT. Unilever Indonesia Tbk"*. KOMMIT, Auditorium Universitas Gunadarma, Depok.

- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*.
- Beasley, Mark S. "An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud." *Accounting Review* (1996): 443-465.
- Budiman, Judi. 2006-2010. *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Dewi, Kristina, Nyoman, Ni. 2013. "Pengaruh Karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN, 2302-8556, Bali.
- Dyreg, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L. 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Hardika, Nyoman Sentosa, and Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. 2007. "Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak." *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 3.2 : 103-112.
- Hartono, Livia Budi. 2008. "Peranan Kandungan Informasi Keuangan dalam Memprediksi Tingkat Return Saham pada PT Semen Gresik, Tbk." *Jurnal Kewirausahaan* 1.2 : pp-47.
- Haruman, Tendi. 2008. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai perusahaan Survey Pada Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek Indonesia."
- Hutagaol, John, Wing Wahyu Winarno, and Arya Pradipta. 2007. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntabilitas* 6.2 : 186-193. Jaya, Tresno Eka. Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance.

- Kurniasih, Tommy, and Maria M. Ratna Sari. 2013. "*Pengaruh Return On Assets, Leverage.*" Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Suadarna, Ketut Alit. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*
- Paligorova, Teodora. 2010. *Corporate risk taking and ownership structure. No. 2010, 3.* Bank of Canada Working Paper.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*
- Puspita, Silvia Ratih dan Harto, Puji. 2010-2012. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*
- Putri, Vicky Rahma, and Niki Lukviarman. 2008. "*Pengukuran Kinerja Bank Komersial dengan Pendekatan Efisiensi: Studi Terhadap Perbankan Go Public di Indonesia.*" Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 12.1.
- Reza, Faisal. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak*
- Rini, Amilia Kartika, and Tarmizi ACHMAD. 2010. *Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO.*
- Saputra, Triyono. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba.* <http://repository.gunadarma.ac.id/handle/123456789/6251>. Diakses tanggal 10 Maret 2013

- Setyaningrum, Dyah. 2005. "*Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan di Indonesia.*" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2.2 : 73-102.
- Siahaan, Mariot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Yogyakarta.*
- Solihin, Ismail. 2007. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability.* Jakarta: Salemba Empat.
- Statistik, Badan Pusat, and U. N. F. P. A. Bappenas. 2005. "*Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025.*" Jakarta, Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA).
- Suandy, Early, 2008. *Perencanaan Pajak. Edisi 4.* Jakarta : Salemba 4.
- Sugiyono, Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, and Pendekatan Kuantitatif.* 2007. "Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo, Y. Mardiasmo. 2002. *Persepsi Akuntan Publik, Pemakai Informasi Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Advertensi Kantor Akuntan Publik pada Eks Karesidenan Semarang.* Kompak Nomor 4: 1-13.

